



**RENCANA KINERJA (RENJA)  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PERIKANAN**

**2022**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	.....	1
1.2	Landasan Hukum	.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4	Sistematika Penulisan	.....	5
<b>II.</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b>	.....	<b>7</b>
	<b>PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU TAHUN</b>		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	7
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	9
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	9
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	10
<b>III.</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	.....	<b>11</b>
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	11
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	14
<b>IV.</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	.....	<b>17</b>
<b>V.</b>	<b>PENUTUP</b>	.....	<b>31</b>

**LAMPIRAN I**

**LAMPIRAN II**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Renja OPD berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka menuju good governance yang tercermin dalam visi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang.

Semoga Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang perikanan.

Liwa, Februari 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



**KAMALUDIN, ST**  
Pembina TK I

NIP. 19660405 198903 1 007

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perikanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun.

Perikanan merupakan salah satu sector prospektif dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Potensi Perikanan ini tersebar di 15 kecamatan yang terdiri atas 3 bidang pokok yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Oleh karena itu, program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas azas otonomi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;

- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang menjabarkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

Tujuan penyusunan rencana kerja adalah agar tersusunnya program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen yang terpadu, terarah dan partisipatif dalam pembangunan dan sebagai acuan dalam rangka mencapai target kinerja dinas perikanan yang telah ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT**

### **DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**

### **DAERAH**

## **BAB V. PENUTUP**

### **LAMPIRAN I**

### **LAMPIRAN II**

## **BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 (lima) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 15 (lima belas) kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 43 (empat puluh tiga) Sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2021 untuk Belanja Langsung sebesar RP. 6.549.939.060,- (Enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) teralisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 6.324.978.281,- atau 96,57 Persen.

Dari seluruh kegiatan **tidak terdapat** kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya **tidak dapat** mencapai 100 persen.

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada Tahun 2021 adalah sebesar 100 persen.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja Dinas Perikanan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Analisis kinerja Dinas Perikanan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Lampung Barat meliputi kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan budidaya ikan. Kegiatan penangkapan ikan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat yaitu penangkapan ikan di perairan umum yang meliputi perairan umum danau, sungai, cek dam, rawa dan genangan air lainnya. Sedangkan untuk potensi kegiatan budidaya ikan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat meliputi kegiatan budidaya di perairan umum, budidaya kolam dan mina padi (budidaya ikan di sawah).

Peningkatan produksi usaha budidaya ikan dan penangkapan ikan diharapkan setiap tahunnya meningkat karena Dinas Perikanan telah melaksanakan beberapa pelatihan – pelatihan kepada pembudidaya dan nelayan selain daripada itu Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan.

Dalam peningkatan konsumsi ikan perkapita Dinas Perikanan juga meningkatkannya melalui kegiatan – kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat, dan pelatihan – pelatihan pengolahan produk perikanan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

#### **Perangkat Daerah**

Adapun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat adalah :

Isu-isu strategis yang perlu penanganan dan mendukung pentingnya pembangunan bidang perikanan adalah sebagai berikut :

1. Produktifitas dan daya saing usaha perikanan belum optimal;
2. Pengetahuan pelaku usaha perikanan terhadap usaha pengolahan hasil perikanan masih rendah;
3. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan / konservasi bidang perikanan

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas perikanan selalu berusaha untuk mencapai program/kegiatan yang telah direncanakan dengan

teralisasinya semua program/kegiatan seperti Kegiatan usaha di bidang perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Barat antara lain kegiatan penangkapan ikan di perairan umum, budidaya ikan di perairan umum, budidaya ikan di kolam dan mina padi (budidaya ikan di sawah). Kegiatan usaha penangkapan ikan perairan umum di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari penangkapan ikan di danau, sungai, rawa, cekdam dan genangan air lainnya yang ter sebar di seluruh kecamatan.

Produksi penangkapan ikan pada tahun 2021 sebesar 586,20 ton atau 107,24% dari target produksi pada tahun 2021 sebesar 546,64 ton. Jika dibandingkan dengan produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2020 sebesar 475,3 ton, pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi sebesar 110,9 ton atau meningkat 23,3% dari tahun 2020.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 31,54 kg/kapita/tahun. Sedangkan target tingkat konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2021 adalah sebesar 31,20 kg/kapita/tahun, dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah sebanyak 312.859 jiwa.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Subkegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan/Subkegiatan yang diusulkan oleh Dinas perikanan selama ini adalah program/kegiatan dari usulan masyarakat dan untuk masyarakat yang telah disurvei dan diverifikasi oleh Dinas Perikanan, untuk memenuhi apa yang diinginkan masyarakat diperlukan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD.

Sehingga pada tahun 2023 Dinas perikanan mengajukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang langsung menyetuh kepada masyarakat.

**BAB III.**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB  
KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten telah mengacu pada kebijakan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Budidaya terus mendorong program prioritas di berbagai daerah, diantaranya: bantuan benih ikan, revitalisasi KJA, dukungan sarana usaha budidaya, pengembangan minapadi dan pengembangan pakan mandiri.

KKP juga fokus mendorong program prioritas secara masif dan menyentuh langsung masyarakat pembudidaya dan diharapkan berdampak positif bagi pencapaian kinerja perikanan budidaya. Seperti contohnya, pengembangan budidaya lele bioflok, dan revitalisasi KJA akan secara langsung memicu peningkatan produksi perikanan budidaya. Begitupun program Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) juga telah memicu peningkatan angka NTUPi.

KKP konsen untuk mendorong strategi pengembangan perikanan budidaya melalui klasterisasi kawasan budidaya berbasis komoditas unggulan, realisasi pembangunan sub-sektor perikanan budidaya diharapkan dapat meningkatkan

masing-masing pertumbuhan PDRB sektor perikanan di seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota se- Indonesia. Dinas perikanan telah memiliki program Pengembangan Budidaya dan tangkap yang selaras dengan kebijakan nasional ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui program GEMARIKAN mempunyai tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi teknis yang membidangi kelautan dan perikanan, namun menjadi tugas seluruh komponen institusi, lembaga, dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Butuh strategi, koordinasi, dan harmonisasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi ikan nasional meningkat, ini dapat menjadi penghela industri perikanan nasional. Ini juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi untuk mendukung percepatan pembangunan industri perikanan nasional salah satunya dengan pembentukan FORIKAN. Dan Dinas Perikanan ada kegiatan Gemarikan dan Lomba Masakan untuk mendukung program nasional tersebut.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **3.2.1. Tujuan OPD**

Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas.

Untuk merealisasikan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Perangkat Daerah secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kabupaten Lampung Barat adalah :

**“Meningkatnya Pendapatan Perkapita”**

### **3.2.2. Sasaran OPD**

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil.

Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan selama kurun waktu jangka menengah 5 tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

**“Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan”**

Adapun tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat dapat juga dilihat dalam table berikut :

**Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	6%	9%	11,50%	14%

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAKAT DAERAH**

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan Dinas Perikanan akan berusaha untuk pendanaan Program dan kegiatan selain dari APBD juga akan berusaha untuk mendapatkan Dana dari Propinsi/Pusat dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

##### **1.1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

1.1.3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

**1.2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

**1.3. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1.3.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

**1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

1.4.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

**1.5. Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1.5.1. Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT

**2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

**2.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

2.1.1. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

**2.2. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**

2.2.1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

2.2.2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

2.2.3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

2.2.4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

**2.3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

2.3.1. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**2.4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

2.4.1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4.5. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

2.4.6. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 3

2.4.7. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

### **3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**3.1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**

3.1.1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

3.1.2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

### **4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

**4.1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

4.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**4.2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan**

4.2.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

**4.3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

4.3.1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3.2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel Detail Sub Kegiatan Tahun 2023 - 2026**

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	2023
1					2	3
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
3	25	01	2.01		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Rapat Koordinasi 12 kali 40 orang
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 26 orang
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	25	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 3 orang
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 Paket
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 paket
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2 paket

3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4 SKHU
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 bulan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 paket
3	25	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel 3 unit
3	25	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 tahun
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 tahun
3	25	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19 Unit
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 unit

3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 unit
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	
3	25	03	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Perahu Tanpa mesin 15 unit
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan jaring 50 buah, pancing 50 buah, cool box penampung ikan 50 buah
3	25	03	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Sosialisasi di Kec. Lumbok Seminung, Sumberjaya, Suoh, Pagar Dewa, Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu dan Air Hitam (1 lokasi, 1 kali kegiatan 40 orang
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pembentukan dan pembinaan kelompok nelayan sebanyak 15 kecamatan
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelatihan temu usaha bagi nelayan sebanyak 90 orang untuk 3 lokasi

<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
3	25	<b>03</b>	<b>2.04</b>	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT sebanyak 5 surat
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan Budidaya Sebanyak 20 Rekomendasi untuk 15 Kecamatan
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Mengadakan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil sebanyak 4 Kelompok di Kecamatan Sumberjaya, Kebun tebu, gedung surian, dan Sekincau
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok sebanyak 90 orang, dari tiga lokasi per lokasi 30 peserta, yang berlokasi di Kec. Gedung Surian, Kec. Kebun Tebu, Kec. Air Hitam

3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelatihan temu usaha bagi pelaku usaha dan perbankan sebanyak dua kali temu usaha 40peserta di Kec. Sumber jaya dan Kec. Lumbok Seminung
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan SL-CBIB dan SL-CPIB 40 Peserta di dua lokasi masing-masing 20 peserta di Kec. Lumbok Seminung dan Kec. Sumberjaya
3	25	04	2.03		<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Budidaya Ikan kecil Sebanyak 500 Rekomendasi untuk 15 Kecamatan
3	25	04	2.04		<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan sebanyak 4 Dokumen di 15 Kecamatan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehap kolam Pemijahan, Pendederan, karantina dan Induk
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Saran Pembudidayaan ikan sebanyak 150 unit yang terdiri dari: Benih : 350.000 Ekor, Pakan 8.400 kg)( 140 Unit) Induk: 10 Paket, Pakan 1.200 kg)( 10 Unit) di 15 Kecamatan Kabupaten Lampung Barat
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya Kolam dan perairan umu

3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan pemantauan ke pelaku usaha budidaya perikanan
3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
3	25	05	2.01		<b>Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengadaan Bibit Ikan Restocking (Ikan nila 40.000 ekor, Nilem 40.000 ekor, mas 40.000 ekor dan siran 4.000 ekor) dan Pelatihan Pokmaswas 30 orang
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang lingkungan sumberdaya perikanan 120 orang
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	
3	25	06	2.01		<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	

3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
3	25	06	2.02		<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelatihan Diversifikasi 90 orang, Sosialisasi Gemarikan 500 orang
3	25	06	2.03		<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cool Box pedagang keliling 144 buah, Kerangka Besi 72 buah, Cool Box > 200 liter 25 buah dan timbangan 72 buah

**BAB V.**

**PENUTUP**

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sub kegiatan tahunan berjalan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Keberadaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, teknologi dan potensi pendukung lainnya yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat, harus dapat diformulasikan secara tepat guna dan berhasil guna dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap keberhasilan upaya pembangunan masyarakat berimplikasi pada percepatan pembangunan perikanan di Kabupaten Lampung Barat yang optimal.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan pusat dan provinsi dan juga dengan para stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan perikanan.

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lampung Barat,



**Kamaludin, ST**  
Pembina TK I  
NIP. 19660405 198903 1 007

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**